

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JALAN PEMUDA BARAT NO 16 MUNTILAN

Nomor Telepon : 0293 587302

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola dalam sebuah perusahaan sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, BPR perlu menerapkan tata kelola yang baik agar mampu mengantisipasi resiko seiring peningkatan volume usaha BPR dan meluasnya pelayanan serta beragamnya produk BPR. Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global yang masih terjadi. Setiap bisnis dapat menimbulkan resiko, untuk itu dalam kondisi saat ini Bank harus mampu mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut. Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo adalah sebagai berikut :
1. Transparansi (transperancy) . 2. Akuntabilitas (accountability). 3. Pertanggungjawaban (responsobility). 4. Independensi (independeayncy). 5. Kewajaran (fairness). Adanya struktur organisasi dapat membantu menjalankan prinsip TARIF di BPR LAM.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	BUDHI ROCHMADI	Direktur	Direksi PT. BPR Lumbungartha Muntilanindo diangkat oleh RUPS untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau Keputusan RUPS. Direktur telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan antara lain: 1. Menetapkan tujuan serta rencana kerja dan anggaran yang realistis,. 2. Tercapainya pertumbuhan tingkat laba, tingkat kesehatan, rasio kredit bermasalah dan efisiensi. 3. Menyusun dan bertanggungjawab penghimpunan dana baik melalui tabungan/deposito berjangka sesuai dengan rencana kerja yang disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK,. 4. Mewakili bank dalam kaitan urusan perusahaan dengan pihak ketiga,. 5. Mereview aplikasi kredit sebelum menyetujui,. 6. Melakukan penilaian secara menyeluruh untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur,. 7. Melakukan survey kepada calon debitur,. 8. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi ketentuan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Sampai saat ini Direktur sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntinanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	MIA BUDY SETYAGRAHA	Komisaris Utama	Dewan Komisaris PT. BPR Lumbungartha Muntinanindo diangkat oleh RUPS untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPR. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan PT. BPR Lumbungartha Muntinanindo, serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders).. Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan antara lain:.. a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.. c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.. d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan. . 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. dan. 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.. e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.. f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. . 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. dan/atau. 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntlanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO	Komisaris	Dewan Komisaris untuk PT. BPR Lumbungartha Muntlanindo diangkat oleh RUPS untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPR. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan PT. BPR Lumbungartha Muntlanindo, serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders). Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan antara lain: a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.. c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.. d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan. . 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR. dan. 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.. e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.. f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. . 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. dan/atau. 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris telah Memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain: Meningkatkan fortopolio Bisnis dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.. Mengoptimalkan penagihan kredit yang telah dihapus buku (WO). Meningkatkan penanganan kredit bermasalah yang menimbulkan ratio NPL yang cukup tinggi. Mengupayakan penurunan NPL. Monitoring dan peran aktif Audit Internal terkait dengan hasil temuan serta perbaikan dari hasil temuan.. Memberikan masukan untuk operasional terkait dengan perbaikan dan pembenahan kinerja operasional.. Meningkatkan kinerja yang baik, menjaga kepercayaan dan tidak melakukan tindakan fraud yang merugikan perusahaan.. Meningkatkan kinerja SDM dilakukan pelatihan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Bank tidak memiliki hal tersebut

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BUDHI ROCHMADI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak ada hubungan keuangan dengan BPRR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BUDHI ROCHMADI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga antar Komisaris dan Pemegang saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	MIA BUDY SETYAGRAHA	4.070.000.000	55,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama BPR Lumbungartha sekaligus Pemegang Saham Pengendali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	MIA BUDY SETYAGRAHA	PT. BPR Artha Berkah Cemerlang	55,00
2	MIA BUDY SETYAGRAHA	PT BPRS Margirizki Bahagia	22,32
3	MIA BUDY SETYAGRAHA	PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara	50,09
4	MIA BUDY SETYAGRAHA	PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara	52,30
5	MIA BUDY SETYAGRAHA	PT. ARTHA BUMI CIPTA SELARAS	27,60
6	MIA BUDY SETYAGRAHA	PT. ANEKA BANGUN CEMERLANG JAYA	27,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

salah satu Dewan Komisaris memiliki saham dibeberapa BPR baik BPR Konvensional maupun Syariah serta kepemilikan saham dibeberapa perusahaan lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	MIA BUDY SETYAGRAHA	tidak ada	tidak ada	MIA BUDY SETYAGRAHA - PEMILIK
2	RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama sekaligus pemegang saham pengendali

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	MIA BUDY SETYAGRAHA	tidak ada	tidak ada	MIA BUDY SETYAGRAHA - PEMILIK
2	RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama merupakan Pemegang Saham Pengendali

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	17500000	2	20700000
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		17500000		20700000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

remunerasi berupa gaji perbulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntlanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	mobil (1)	mobil (1)
3	Asuransi Kesehatan	tidak ada	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas lainnya selain tersebut di atas yaitu pemberian tunjangan pajak penghasilan yang dibayar semua oleh Bank serta tunjangan BPJS sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tunjangan BBM kendaraan dinas

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,17	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,52	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,50	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Semua pegawai berhak atas penerimaan gaji yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	02-03-2023	4	Materi rapat dekom: realisasi tabungan, deposito, dan kredit. progres kredit relaksasi, progres kredit write off, progres kredit di Banajr, tingkat kesehatan bank, dan kedit yang sudah lunas. Realisasi kredit di bulan Februari 2023, target kredit bulan Maret.
2	09-05-2023	4	Materi Rapat:. 1. Perbandingan nilai TKS dan NPL bulan Maret dan April 2023,. 2. Kondisi KAP bank sejak Januari - April 2023,. 3. NPL bruto bank sejak Januari - April 2023,. 4. RR bank sejak Januari - April 2023,. 5. Pencairan kredit bulan April 2023,. 6. Total KYD bulan April 2023, 7. Laba/rugi bulan April 2023.
3	15-07-2023	4	Materi rapat dekom:. 1. Evaluasi NPL dan pertumbuhan kredit dari bulan Mei - Juni dan Rencana kerja bulan depan,. 2. Evaluasi profil risiko,. 3. Evaluasi penerapan APU PPT,. 4. Evaluasi tindak lanjut auditor terkait komitmen OJK,. 5. Pemantauan ketentuan dan pengelolaan SDM.
4	02-08-2023	4	Materi rapat dekom:. 1. Rencana dan evaluasi kerja,. 2. Evaluasi profil risiko,. 3. Evaluasi penerapan APU PPT,. 4. Evaluasi tindak lanjut editor,. 5. Pemantauan ketentuan dan pengelolaan SDM.
5	24-10-2023	4	Materi rapat Dekom:. 1. Evaluasi kinerja Oktober yang menurun dan plan untuk perbaikan NPL dan pertumbuhan kredit bulan depan,. 2. Evaluasi tindak lanjut auditor pemenuhan komitmen LHP AI,. 3. Pemantauan ketentuan dan pengelolaan SDM.
6	29-11-2023	4	Materi rapat Dekom:. 1. Evaluasi kinerja Oktober yang menurun dan plan untuk perbaikan NPL dan pertumbuhan kredit bulan depan,. 2. Evaluasi tindak lanjut auditor pemenuhan komitmen OJK,. 3. Pemantauan ketentuan dan pengelolaan SDM.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tercatat dalam satu tahun dilaksanakan rapat dekom sebanyak 6x

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	MIA BUDY SETYAGRAHA	6	0	100,00
2	RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO	6	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tercatat dalam 1 tahun kehadiran dekom untuk rapat sebanyak 6 kali

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	1
Telah Diselesaikan		0		0		0		1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penyimpangan internal yang dilakukan oleh salah satu karyawan LAM yang menyatakan bahwa uang angsuran debitur dipakai untuk keperluan pribadi. Yang bersangkutan telah menyelesaikan tanggungan / pengembalian dana tersebut pada bulan Oktober 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

dalam satu tahun terdapat 2 permasalahan hukum yang telah selesai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230102	Kegiatan Sosial	Pembelian karangan bunga atas pembukaan Car Wash Nasabah an Miftah	Miftah	400.000
2	20230113	Kegiatan Sosial	Pemberian tanda kasih atas pernikahan karyawan an Albertha	Albertha	1.000.000
3	20230126	Kegiatan Sosial	Karangan bunga atas sertijab Kapolresta Magelang	Kapolresta Magelang	500.000
4	20230216	Kegiatan Sosial	Bantuan tanda kasih untuk karyawan sakit an Yudhi Heri P.	Yudhi Heri P.	700.000
5	20230302	Kegiatan Sosial	Karangan bunga atas meninggalnya nasabah an Dedi S.	Dedi S.	500.000
6	20230306	Kegiatan Sosial	Pemberian tanda kasih atas meninggalnya ayahanda karyawan an Novi Asiya	Novi Asiya	1.500.000
7	20230314	Kegiatan Sosial	Pembayaran iklan ucapan HUT ke-5 PINtech	PINtech	475.000
8	20230315	Kegiatan Sosial	Pemberian karangan bunga untuk HUT BPR ABC	BPR ABC	450.000
9	20230508	Kegiatan Sosial	Pembelian doorprize dalam rangka Halal Bi Halal PERBARINDO Kedu	PERBARINDO Kedu	500.000
10	20230527	Kegiatan Sosial	Pemberian tanda kasih atas pernikahan karyawan an Kiki Aprilia	Kiki Aprilia	1.000.000
11	20230711	Kegiatan Sosial	Pemberian tanda kasih untuk anak karyawan khitanan an Dany Irawan	Dany Irawan	500.000
12	20230722	Kegiatan Sosial	Karangan bunga atas Meninggalnya Eks Komisaris PT BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara	Eks Komisaris PT BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara	350.000
13	20230802	Kegiatan Sosial	Pembelian hand bouquet untuk alm H Budi Setyagraha	Keluarga alm H Budi Setyagraha	150.000
14	20230807	Kegiatan Sosial	Pembelian buah untuk karyawan sakit an Suni Farida	Suni Farida	154.000
15	20230811	Kegiatan Sosial	Partisipasi dalam rangka HUT RI ke-78 untuk Kecamatan Salam	Kecamatan Salam	100.000
16	20230811	Kegiatan Sosial	Partisipasi dalam rangka HUT RI ke-78 untuk dusun Sidomukti, Tempuran	Dusun Sidomukti, Tempuran	100.000
17	20230811	Kegiatan Sosial	Partisipasi dalam rangka HUT RI ke-78 untuk Desa Pucungrejo	Desa Pucungrejo	300.000
18	20230829	Kegiatan Sosial	Biaya akomodasi partisipasi dalam rangka HUT RI ke-78 di Kecamatan Muntilan	Kecamatan Muntilan & Perwakilan Karyawan LAM	470.000
19	20230908	Kegiatan Sosial	Bantuan tanda kasih untuk karyawan sakit an Iwan Setya	Iwan Setya	700.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
20	20230914	Kegiatan Sosial	Bantuan tanda kasih untuk karyawan sakit an Setiawan R. Amin	Setiawan R. Amin	700.000
21	20231010	Kegiatan Sosial	karangan bunga atas HUT Bank Mandiri ke 25	Bank Mandiri	500.000
22	20231027	Kegiatan Sosial	Pembelian buah untuk karyawan sakit an Alysia	Alysia	100.000
23	20231030	Kegiatan Sosial	Pembelian buah untuk istri karyawan kecelakaan an Bambang W.	Bambang W.	150.000
24	20231211	Kegiatan Sosial	Pemberian dana duka cita atas meninggalnya ayahanda dari karyawan LAM	sunid farida	1.500.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian dana dalam rangka bina lingkungan (Kegiatan Sosial), baik itu kepada pihak ke tiga atau ke karyawan LAM

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo
Posisi Laporan : 31-12-2023
Alamat : JALAN PEMUDA BARAT NO 16 MUNTILAN
Nomor Telepon : 0293 587302
Modal Inti BPR : 8.814.555.963,00
Total Aset BPR : 29.023.741.511,00
Bobot BPR : B
Status Audit Ekstern : Diaudit
Nilai Komposit : 2,5
Peringkat Komposit : 2
Analisis : PT BPR Lumbungartha Muntilanindo secara tata kelola belum sesuai dengan ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,17	1,10	0,28	2,55	0.510	Pada BPR Lumbungartha Muntilanindo terdapat kekosongan jabatan Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,11	1,00	0,20	2,31	0.347	Pada BPR Lumbungartha terdapat 2 Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Karena PT BPR Lumbungartha ada di Posisi B maka tidak menerapkan Komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,20	2,50	0.250	PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang ada
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,60	1,44	0,23	3,27	0.327	PT BPR Lumbungartha Muntilanindo memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa sudah sesuai dengan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	1,10	0,23	2,33	0.233	PE Audit Intern telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dan pihak eksternal (OJK)
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	1,00	0,20	2,20	0.055	PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	1,03	0,25	2,45	0.245	PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan manajemen risiko dalam bentuk profil risiko sebagai evaluasi dan perbaikan. Laporan Profil risiko juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.165	PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dan telah melaksanakan secara disiplin dengan pemantauan agar tidak terjadi pelampauan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,17	1,00	0,20	2,37	0.178	Rencana Bisnis Bank PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	1,10	0,35	2,95	0.221	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah didukung oleh sistem dan SDM yang memadai dan bank telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi yang dilaporkan ke OJK setiap triwulan serta memiliki web dimana terdapat laporan keuangan didalamnya
Nilai Komposit						2.5	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	Jumlah anggota Direksi di BPR Lumbungartha 1 orang, dan belum memenuhi Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan lokasi Kantor Pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Anggota Direksi tidak merangkap Jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi cukup mampu menangani proyek yang bersifat khusus
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	seluruh anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS Nomor 65 tanggal 12 Desember 2022
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi sudah Independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan Audit Intern dan Pengawas lainnya
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi telah menyediakan data dan informasi kepada Dewan komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan dilakukan atas persetujuan Dirut
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi sudah independen
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Anggota Direksi cukup membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi belum sepenuhnya mengimplementasikan kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi cukup melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib Kerja Direksi
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS,
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi cukup mengkomunikasikan ke semua karyawan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Direksi cukup tertib dalam administrasi dokumen rapat direksi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Pencapaian belum sepenuhnya peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	3	Direksi telah menyampaikan Ke pihak OJK dan Perbarindo
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,28	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Dewan Komisaris di BPR Lumbungartha berjumlah 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	4	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	3	Semua Dewan komisaris bertempat tinggal di perbatasan Provinsi dengan lokasi kantor pusat
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	pembuatan pedoman dan tata tertib kerja serta pelaksanaannya sudah cukup baik
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki Hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Salah satu Anggota Komisaris adalah PSP
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,11	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	dalam pelaksanaannya sudah baik
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	dalam pelaksanaannya sudah baik
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Komisaris cukup independen dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan BPR
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	cukup dalam melakukan pengawasan melalui komitmen/ Action Plan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	telah melakukan rapat koordinasi antar komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Keputusan diambil berdasarkan persetujuan komisaris utama
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan komisaris independen
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	dalam pelaksanaannya cukup baik
	Total nilai skala penerapan	20	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	dalam pelaksanaannya tertib administrasi
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Bank cukup memiliki ketentuan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam terjadi benturan kepentingan akan diputuskan secara hati - hati
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Sudah didokumentasikan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	4	Terdapat kekosongan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	4	Terdapat kekosongan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bekerja secara Independen
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Telah melakukan secara bertahap
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Telah memiliki ketentuan secara periodik saja
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	3,20	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	4	Terdapat kekosongan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	4	Terdapat kekosongan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	4	Terdapat kekosongan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Sudah menjalankan Fungsinya dan tugasnya
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Telah dilakukan secara bertahap
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	3,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,44	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	ditahun 2022 tingkat pelanggaran sangat berkurang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang Membawahkan fungsi kepatuhan telah menjalankan tugasnya, dan sesuai dengan ketentuan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direktur YMFK menyampaikan laporan Khusus apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Bpr telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	bank telah memiliki ketentuan atau pedoman
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Sudah menjalankan tugasnya secara Independen
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Telah sesuai dengan ketentuan dan tanggungjawabnya
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Pengembangan Sumber daya manusia dengan mengikutsertakan Pelatihan - pelatihan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Penerapannya belum maksimal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Audit internal telah menyusun program kerja
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Telah meningkatkan SDM dengan diikutkannya pelatihan- pelatihan yang berkaitan dengan jabatannya
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	PE AI telah menyampaikan laporannya kepada Direktur Utama dan kepada Dewan Komisaris
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Telah menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyampaian laporan pengangkatan dan pemberhentian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	sesuai dengan ketentuan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3	laporan hasil audit KAP dilaporkan secara rutin sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	sesuai ketentuan yang berlaku namun untuk periode tahun 2023 masih dalam proses audit
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sesuai ketentuan yang berlaku namun untuk periode tahun 2023 masih dalam proses audit

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	Pejabat Manrisk dirangkap oleh PE Kepatuhan & APU PPT
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	telah memiliki kebijakan dan penetapan limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Sudah memiliki
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Belum maksimal dalam evaluasi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	sudah dilakukan namun masih secara periodik
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Cukup melakukan proses pengendalian
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Belum seluruhnya
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cukup disiplin dalam penerapan manrisk
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	telah memiliki sistem yang mendukung dalam menyediakan data dan informasi
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	sudah dilakukan beberapa pelatihan namun belum sepenuhnya di terapkan
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,57	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,03	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	telah sesuai dengan ketentuan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	sudah memiliki ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	pengkinian telah sesuai dengan ketentuan namun belum secara periodik
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	memenuhi ketentuan dan sudah memperhatikan prinsip kehati-hatian
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada kredit terhadap pihak terkait yang melampaui BMPK untuk dilaporkan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar maupun melampaui BMPK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Hasil Rencana Bisnis BPR telah disetujui dewan komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Telah dilakukan secara bertahap
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis Bank sepenuhnya di dukung oleh Pemegang Saham
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Dilakukan secara bertahap
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Disampaikan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Telah didukung oleh sistem informasi dan SDM yang cukup memadai
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah menyusun Laporan sesuai dengan ketentuan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan tahunan disusun saat hasil pemeriksaan dari KAP sudah ada
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Telah dilakukan secara bertahap mengenai transparansi Informasi mengenai produk bank
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Terdapat kekosongan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Tidak ada laporan pengaduan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	3,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,35	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Lumbungartha Muntilanindo

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

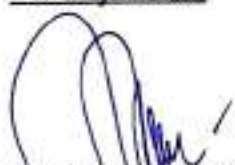
- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Magelang, 30 Januari 2024

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

Disetujui Oleh


BUDHI ROCHMADI
DIREKTUR



Mengetahui


RADEN DIONESIUS ANTO W.
KOMISARIS



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO
Alamat : JALAN PEMUDA NO 16 MUNTILAN
Nomor Telepon : 0293 587302
Posisi Laporan : Desember 2023
Modal Inti : Rp8.814.555.963
Total Aset : Rp29.023.741.511

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.5 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.55	0.51
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.31	0.347
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.5	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3.27	0.327
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.33	0.233
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.2	0.055
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.45	0.245
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.2	0.165
10	Rencana Bisnis BPR	2.37	0.178
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.95	0.221
Nilai Komposit			2.5
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.55)

Pada BPR Lumbungartha Muntilanindo terdapat kekosongan jabatan Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.31)

Pada BPR Lumbungartha terdapat 2 Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Karena PT BPR Lumbungartha ada di Posisi B maka tidak menerapkan Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang ada

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 3.27)

PT BPR Lumbungartha Muntilanindo memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa sudah sesuai dengan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.33)

PE Audit Intern telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dan pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.2)

PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.45)

PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan manajemen risiko dalam bentuk profil risiko sebagai evaluasi dan perbaikan. Laporan Profil risiko juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)

PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dan telah melaksanakan secara disiplin dengan pemantauan agar tidak terjadi pelampauan



10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.37)

Rencana Bisnis Bank PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.95)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT BPR Lumbungartha Muntilanindo telah didukung oleh sistem dan SDM yang memadai dan bank telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi yang dilaporkan ke OJK setiap triwulan serta memiliki web dimana terdapat laporan keuangan didalamnya

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

PT BPR Lumbungartha Muntilanindo secara tata kelola belum sesuai dengan ketentuan

Magelang, 30 Januari 2024

PT. BPR LUMBUNGARTHA MUNTILANINDO

Disetujui Oleh


BUDHI ROCHMADI
DIREKTUR



Mengetahui


RADEN DIONESIUS ANTO W.
KOMISARIS